

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM UPAYA PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Rahmi Wardah Ningsih
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Email : Rahmiwardahn@gmail.com

Niken Farida
Universitas Sari Mutiara Indonesia
Email : Nikenfarida94@gmail.com

Abstrak : Pemberdayaan di dalam bidang pendidikan (termasuk PAUD) tidak bisa melalui pendekatan yang parsial akan tetapi memerlukan pendekatan secara holistic yang meliputi pemberdayaan sumberdaya manusia (termasuk didalamnya pendidik, peserta didik, orang tua/wali, masyarakat lingkungan pendidikan, sponsor/pemerintas, dan pengguna lulusan), system pembelajaran, manajemen kelembagaan pendidikan dengan segala sarana dan rasaran pendukungnya, sumberdaya alam, sumberdaya teknologi, dan lain sebagainya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap dan membahas tentang pemberdayaan masyarakat dalam upaya peningkatan mutu Pendidikan Anak Usia Dini. Metode yang digunakan adalah dengan menggunakan studi literatur dan prasurvei ke PKBM di Kota Medan. Hasil penelitian mendeskripsikan uraian tentang pemberdayaan masyarakat dalam upaya peningkatan mutu Pendidikan Anak Usia Dini.

Kata kunci : *Pemberdayaan Masyarakat, Upaya Peningkatan Mutu, Pendidikan Anak Usia Dini*

Abstract : Empowerment in the field of education (including PAUD) cannot bethrough a partial approach but a holistic approach that includes empowering human resources (including educators, students, parents/guardians, educational environment communities, sponsors/administration, and graduate users), system learning, management of educational institutions with all their supporting facilities and infrastructure, natural resources, technological resources, and so on. The purpose of this study is to reveal and discuss community empowerment in an effort to improve the quality of Early Childhood Education. The method used is by using literature studies and pre-survey to PKBM in Medan City. The results of the research explain about community empowerment in an effort to improve the quality of Early Childhood Education.

Keywords : Community Empowerment, Quality Improvement Efforts, Early Childhood Education

PENDAHULUAN

Pendidikan formal dan nonformal merupakan lembaga vital yang berperan utama sebagai kunci untuk mempersiapkan kebutuhan masa depan bangsa

berdasarkan aspek intelektual dan keterampilan. Umrotul Khasanah, (2010: 54) pemberdayaan terpadu untuk membangun kemandirian dan pelayanan masyarakat, dengan melihat realitas hasil/out put pendidikan yang berkembang saat ini, di mana lulusan yang dihasilkan dari proses pendidikan cenderung masih didominasi oleh sifat ketergantungan. Sebagai contoh mahasiswa yang kuliah di jurusan pendidikan bahwa orientasi mereka menjadi guru PNS, kondisi ini merupakan tantangan untuk pendidikan agar menghasilkan lulusan yang mandiri dan siap berkompetisi dalam persaingan global, dengan cara harus memposisikan diri dengan menakar arus global, dalam arti yang sesuai dengan pedoman dan ajaran. Untuk itu maka perlu adanya pembaharuan mutu pendidikan dalam arti hasil pendidikan harus dapat mencetak manusia-manusia yang berkualitas. Pendidikan yang berkualitas dapat meningkatkan sumber daya manusia menjadi lebih produktif sesuai dengan program Pemerintah Pusat melalui Dinas Pendidikan Nasional mencanangkan rencana strategis menuju pembangunan jangka panjang 2025. Rencana strategis yang dijalankan oleh Dinas Pendidikan Nasional ditempuh dalam empat tahapan dengan periode lima tahunan. Periode 2005-2010 diarahkan dalam rangka peningkatan kapasitas dan modernitas sistem pendidikan, periode 2010-2015 adalah peningkatan dan penguatan pelayanan pendidikan pada tingkat nasional, periode 2015-2020 adalah penguatan daya saing pada tingkat regional, dan periode 2020-2025 adalah penguatan daya saing pada tingkat internasional, salah satunya program PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini).

Permasalahan utama PAUD di Indonesia adalah pemerataan dan akses layanan PAUD serta kualitas layanan PAUD, hal ini disebabkan oleh pembiayaan yang terbatas, luas wilayah Indonesia ditambah lagi dengan demografi yang sangat beragam, sehingga jarak tempuh menjadi kendala utama dalam perluasan akses layanan. Sementara itu terkait dengan mutu pendidikan dipengaruhi oleh fasilitas lembaga layanan PAUD yang masih kurang dan pendidik yang masih berkualifikasi rendah. Berdasarkan Pra survey yang dilakukandi PKBM di Kota Medan di antaranya di PKBM Ronaa, PKBM Nusantara, PKBM Widya Karya dan Al-Suroya pada tanggal 11-15 Januari 2019 bahwa program pendidikan nonformal dalam pelaksanaannya masih menghadapi kendala antara lain: pendidikan anak usia dini belum mendapat perhatian yang proporsional. Selain permasalahan masih terbatasnya layanan atau kekurangan jumlah lembaga untuk pelayanan PAUD, masalah keberlanjutan lembaga pendidikan yang telah berdiri juga merupakan masalah yang tidak kalah pentingnya. Tidak sedikit lembaga PAUD yang menghadapi permasalahan dalam pengembangan PAUD antara lain terbatasnya tenaga pendidik yang kompeten dan terbatasnya kemampuan keuangan sehingga tidak mampu menutupi biaya operasional, yang pada akhirnya lembaga PAUD tersebut ditutup.

Keterbatasan pendanaan pemerintah untuk menjangkau semua anak mengharuskan lembaga PAUD mencari sumber dana baik dari pemerintah maupun masyarakat sekitar, untuk mendirikan lembaga PAUD yang baru maupun untuk keberlanjutan lembaga PAUD yang telah berdiri, setiap lembaga harus mengembangkan sumber pembiayaan sendiri agar eksistensi lembaga dapat berkelanjutan sekaligus dapat meningkatkan kualitas layanannya. Untuk itu perlu belajar dari Yayasan yang telah mendirikan lembaga PAUD bersama masyarakat yang kemudian dilepas secara mandiri dan dikelola oleh masyarakat setempat. Kemandirian lembaga PAUD penting karena peransertanya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, melalui akses dan peningkatan mutu secara berkelanjutan pada anak usia dini. Dengan akses dan kualitas yang selalu meningkat diharapkan akan berkontribusi pada pendidikan anak selanjutnya dan diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup kelak di masa dewasanya.

METODE

Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dari buku-buku dan artikel karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan. Dipaparkan dengan deskriptif konstruktif dan interpretasi pada isi pokok bahasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses pemberdayaan di dalam bidang pendidikan (termasuk PAUD) tidak bisa melalui pendekatan yang parsial akan tetapi memerlukan pendekatan secara holistic yang meliputi pemberdayaan sumberdaya manusia (termasuk didalamnya pendidik, peserta didik, orang tua/wali, masyarakat lingkungan pendidikan, sponsor/pemerintas, dan pengguna lulusan), sistem pembelajaran, manajemen kelembagaan pendidikan dengan segala sarana dan rasaran pendukungnya, sumberdaya alam, sumberdaya teknologi, dan lain sebagainya. Djalal Fasli (2001: 77) Pemberdayaan dimaksudkan dalam upaya proses mengembangkan potensi (daya) dan kemampuan yang terdapat dalam diri individu dan kelompok masyarakat sehingga mampu melakukan transformasi sosial. Proses ini berlangsung secara berkesinambungan, sesuai dengan prinsip-prinsip belajar sepanjang hayat (life long education), oleh sebab itu kehidupan masyarakat perlu dikondisikan sebagai sebuah wadah, institusi, dan organisasi bagi anggota masyarakat yang melakukan aktivitas-aktivitas yang syarat dengan proses pembelajaran. Artinya terjadi proses interaksi edukatif yang menurut Maslow (1984) di sebut proses "dialog" yang mendorong masyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar/fisik sampai kepada kebutuhan aktualisasi diri.

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses, dimana kekuatan masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan lebih dominan, dan dalam pelaksanaannya peranan masyarakat lebih diutamakan. Hal ini mungkin dicapai dengan menguatkan kapasitas mereka melalui pemberian kesempatan, keahlian dan

pengetahuan sehingga mereka mampu untuk menggali dan memanfaatkan potensi yang mereka miliki.

Memberdayakan masyarakat haruslah pertama-tama dimulai dengan menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang, karena tidak ada masyarakat yang sama sekali memberikan kekuatan dan kemampuan, sehingga didalam pemberdayaan mengandung dua pihak yang perlu ditinjau dengan seksama yaitu pihak yang diberdayakan dan pihak yang memberdayakan. Agar dapat memperoleh hasil yang memuaskan diperlukan komitmen yang tinggi dari kedua pihak. Dari pihak pemberdaya harus beranjak dari pendekatan bahwa masyarakat tidak dijadikan obyek dari berbagai program dan *program* pembangunan, akan tetapi merupakan subyek dari upaya pembangunan sendiri. Untuk itu, maka dalam pemberdayaan masyarakat, harus mengikuti pendekatan yang terarah, dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi kelompok sasaran dan menggunakan pendekatan kelompok.

Djalal Fasli (2001: 89) menyatakan bahwa proses pemberdayaan para petugas perubahan (*change agen*) dapat melakukan dua pendekatan yaitu:

1. Pendekatan Direktif

Pendekatan direktif atau pendekatan instruktif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan asumsi bahwa petugas tahu apa yang dibutuhkan dan apa yang baik untuk masyarakat. Dalam pendekatan ini peranan *change agent* bersifat lebih dominan karena prakarsa kegiatan dan sumber daya yang dibutuhkan lebih banyak berasal dari *change agent* serta menetapkan apa yang baik dan buruk bagi masyarakat, selanjutnya menyediakan sarana yang diperlukan untuk perbaikan tersebut. Dengan pendekatan seperti ini, prakarsa dan pengambilan keputusan berada di tangan *change agent*. Dengan pendekatan ini banyak hasil yang diperoleh, tetapi hasil yang diperoleh lebih terkait dengan tujuan jangka pendek dan seringkali lebih bersifat pencapaian secara fisik. Pendekatan ini menjadi kurang efektif untuk mencapai hal-hal yang sifatnya jangka panjang ataupun perubahan yang lebih mendasar yang berkaitan dengan perilaku seseorang. Hal ini antara lain disebabkan akan perlunya perubahan pengetahuan (*knowledge*), keyakinan (*belief*), sikap (*attitude*) dan niat (*intention*) individu sebelum terjadinya perubahan perilaku (*over behaviour*), bila agen perubahan (*change agent*) menginginkan perubahan yang terjadi bukanlah perubahan yang bersifat temporer.

2. Pendekatan Non-direktif

Pendekatan non-direktif atau partisipatif dilakukan berlandaskan asumsi bahwa masyarakat tahu apa yang sebenarnya mereka butuhkan dan apa yang baik untuk mereka. pada pendekatan ini petugas tidak menempatkan diri sebagai orang yang menetapkan apa yang baik atau buruk bagi suatu masyarakat. Perubahan masyarakat adalah masyarakat itu sendiri, petugas lebih bersifat

manggali dan mengembangkan potensi masyarakat. Masyarakat diberikan kesempatan untuk membuat analisis dan mengambil keputusan yang berguna bagi mereka sendiri, serta mereka diberi kesempatan penuh dalam penentuan cara-cara untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan. Peran petugas disini sebagai katalisator, pemercepat perubahan yang membantu mempercepat perubahan terjadinya perubahan dalam suatu masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan ini, petugas berusaha untuk merangsang tumbuhnya kemampuan masyarakat untuk menentukan arah langkahnya sendiri (self-determination) dan kemampuan untuk menolong dirinya sendiri (self help). Tujuan dari pendekatan non direktif dalam upaya pengembangan masyarakat adalah agar masyarakat memperoleh pengalaman belajar untuk mengembangkan dirinya (masyarakat tersebut) melalui pemikiran dan tindakan yang dirumuskan oleh mereka. pendekatan non direktif ini sering juga dianggap sebagai pendekatan yang bersifat partisipatif

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dilihat bahwa dalam proses pemberdayaan terdapat dua pihak yang saling berhubungan yaitu pihak yang memberdayakan atau lebih sering disebut sebagai agen perubahan (change agent) atau community worker atau tenaga pendamping dan pihak yang diberdayakan. Dalam melakukan pemberdayaan, pihak pemberdaya perlu memilah-milah strategi pemberdayaan yang tepat dan sesuai dengan kondisi target perubahan.

a. Strategi Pemberdayaan

Tiga strategi dasar pemberdayaan yaitu:

- a. Pemberdayaan melalui kebijakan dan perencanaan, dilakukan dengan merubah struktur dan lembaga-lembaga yang ada agar terjadi akses yang sesuai dengan sumber-sumber dan pelayanan-pelayanan, serta munculnya partisipasi dalam kehidupan masyarakat
- b. Pemberdayaan melalui aksi sosial dan politik, menekankan kepada oentingnya perjuangan dan perubahan politik untuk meningkatkan keberdayaan yang lebih efektif, dimana masyarakat dapat dilibatkan untuk melakukan aksi-aksi langsung
- c. Pemberdayaan melalui pendidikan dan penyadaran, menekankan pada pentingnya proses pendidikan, sehingga pihak yang diberdayakan memperoleh kemampuan-kemampuan. Cara ini dilakukan dengan memberikan pengetahuan akan berbagai hal yang menjadi kendala baik structural maupun kendala-kendala kemasyarakatan, juga memberikan keyterampilan untuk berkarya secara efektif untuk menuju perubahan

A. UPAYA MENINGKATKAN MUTU PAUD

Peningkatan mutu pendidikan dapat dicapai melalui berbagai cara, antara lain melalui peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan lainnya, pelatihan dan pendidikan, atau dengan memberikan kesempatan untuk menyelesaikan

masalah-masalah pembelajaran dan nonpembelajaran secara profesional lewat penelitian tindakan secara terkendali. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan PAUD adalah menggunakan sarana bermain dalam bentuk edukatif (Hiryanto, dkk, 2010: 47). Sarana bermain dalam bentuk Alat Permainan Edukatif (APE), sebagai sarana yang berfungsi membantu pamong dalam menciptakan situasi pembelajaran serta merangsang dalam pembentukan perilaku tertentu.

Hampir semua taman penitipan anak maupun kelompok bermain telah memiliki alat permainan edukatif walupun dilihat dari jumlah dan jenisnya masing-masing lembaga sangat bervariasi, hal ini tergantung dari kemampuan lembaga tersebut, ada yang sangat lengkap, tetapi ada juga yang masih sangat terbatas. Termasuk juga ketersediaan sarana/prasarana pendukung lainnya seperti ruang belajar, ruang bermain dan perlengkapan lainnya juga sangat bervariasi (Hiryanto, dkk., 2010: 9). Pencapaian mutu pendidikan anak usia dini dapat diukur dengan membandingkan hasil pencapaian program dengan standar nasional yang telah ditetapkan. Komponen input, proses dan output, lembaga pendidikan anak usia dini dikatakan bermutu apabila aktivitas pelayanan yang dilakukan betul-betul mengarah pada pencapaian hasil yang diharapkan dengan mendayagunakan input-input yang ada secara terpadu, harmonis dan optimal.

Standar kurikulum, proses pembelajaran, peserta didik, ketenagaan, sarana dan prasarana, peran serta masyarakat, organisasi kelembagaan, administrasi dan manajemen serta lingkungan pendukung dan pembiayaan, dengan kata lain layanan PAUD bermutu manakala dapat memenuhi Standar Minimal Manajemen (SMM), Standar Minimal Tenaga Kependidikan (SMTK) serta Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Hiryanto, dkk., 2010: 10-11). Sebagaimana pada pasal 3 ayat 2 bahwa kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini. Acuan untuk meningkatkan mutu atau kualitas PAUD, diantaranya acuan itu adalah sebagai berikut:

- 1) Ada standar minimal sebelum masyarakat atau yayasan mendirikan lembaga PAUD,
- 2) pendidik yang akan terjun langsung di PAUD seharusnya di latih terlebih dahulu minimal 2 bulan, sehingga ketika terjun bisa menguasai kelas dengan baik;
- 3) pendidik PAUD harus tidak berhenti belajar, hendaknya mengikuti pelatihan rutin baik itu sebulan sekali atau dua minggu sekali,
- 4) pengoptimalan Himpaudi & Forum PAUD, agar lebih mengerti pelatihan yang mendesak harus diadakan itu apa;
- 5) mengadakan studi banding,

- 6) guru lebih meningkatkan gemar membaca karena ilmu tentang PAUD sangat luas, apalagi mempelajari anak yang unik di butuhkan ilmu yang banyak;
- 7) guru atau pendidik harus sekolah lagi;
- 8) pengalokasian dana dari Pemerintah Daerah untuk peningkatan mutu pendidik PAUD di daerah masing-masing;
- 9) di tumbuhkan jiwa meneliti bagi para guru karena begitu kompleknya permasalahan anak, maka setidaknya pendidik harus gemar meneliti jika ada permasalahan yang di rasa mengganjal (Irianwati, Nanik, 2013: 33)

Keterbatasan dana yang dimiliki, kurangnya sarana dan prasarana, serta rendah dan keterbatasan sumber daya manusia yang berkualitas serta memiliki kepedulian terhadap pendidikan anak usia dini, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan anak usia dini khususnya pada masyarakat pedesaan sehingga masyarakat, melakukan pembinaan terhadap tenaga kependidikan melalui program pengayaan maupun mengikutsertakan pengelola maupun pendidik dalam berbagai pelatihan maupun workshop pendidikan anak usia dini (Hiryanto, dkk, 2010: 12).

Guna menghasilkan mutu, terdapat empat usaha yang harus dilakukan oleh lembaga pendidikan, yaitu:

- 1) Menciptakan situasi “menang-menang” (win-win solution) dan bukan situasi “kalah-menang” diantara pihak yang berkepentingan dengan lembaga pendidikan (stakeholders).
- 2) Perlu ditumbuh kembangkan motivasi instrinsik pada setiap orang yang terlibat dalam proses meraih mutu;
- 3) Setiap pimpinan harus berorientasi pada proses dan hasil jangka panjang;
- 4) Menggerakkan segala kemampuan lembaga pendidikan untuk mencapai mutu yang ditetapkan, haruslah dikembangkan adanya kerjasama antar unsur-unsur pelaku proses mencapai hasil mutu (Slamet dalam Laelatul Istiqomah 2016: 79).

B. HUBUNGAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TERHADAP PAUD

Pemberdayaan sebagai subjek yang menjadi keragaman karakter, potensi dan kebutuhan. Masalahnya adalah bagaimana pemberdayaan masyarakat terhadap PAUD dapat membangkitkan kesadaran dan memotivasi agar mampu menggali potensi diri dan lingkungannya untuk berpartisipasi aktif dalam meningkatkan kualitas kehidupannya sehingga mampu hidup mandiri dan sejahtera. Dapat disimpulkan bahwa strategi yang tepat dalam pemberdayaan masyarakat harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi dilapangan. Untuk itu pemberdayaan perlu memiliki kemampuan merumuskan program dan strategi pemberdayaan yang tepat dan efisien. Patmonodewo, S. (2003: 44) Pemberdayaan masyarakat melalui

modernisasi penajaman arah perubahan struktur sosial ekonomi (termasuk didalamnya kesehatan), budaya dan politik yang bersumber pada partisipasi masyarakat merupakan salah satu strategi terobosan agar lembaga PAUD dapat eksis.

Memberdayakan masyarakat mengandung makna mengembangkan, memandirikan, mensadarkan dan memperkuat potensi tawar-menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan disegala bidang dan sektor kehidupan, disamping itu juga mengandung arti melindungi dan membela dengan berpihak kepada yang lemah, untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan eksploitasi yang lemah (Andri Hadiansyah dkk, 2015: 58). Pelibatan orang tua merupakan proses aktif dan inisiatif yang muncul dari orang tua serta akan terwujud sebagai suatu kegiatan nyata, Adanya kemauan dan kemampuan adalah muncul dari dalam diri orang tua sedangkan kesempatan dapat diberikan dari luar diri. Kemauan dan kemampuan dapat muncul apabila didorong oleh pengetahuan yang cukup mengenai pentingnya pelibatan orang tua di sekolah serta manfaat yang akan diperoleh dari kegiatan tersebut. Sedangkan kesempatan dapat diciptakan oleh waktu yang disediakan orang tua sendiri ditengah-tengah kesibukannya, juga diberikan oleh sekolah sebagai institusi pendidikan tempat anak-anak menimba ilmu pengetahuan. Patmonodewo, S. (2003: 76) Apabila semua pihak yang berada di sekolah memberikan ruang bagi orang tua untuk dapat terlibat dan orang tua tersebut memiliki pengetahuan yang cukup atas pentingnya dan manfaatnya terlibat di sekolah sehingga timbul kemauan dan terus mengasah kemampuannya agar dapat diterima dan berperan aktif dalam pendidikan anaknya di sekolah.

Pelibatan orang tua merupakan proses aktif dan inisiatif yang muncul dari orang tua serta akan terwujud sebagai suatu kegiatan nyata apabila orang tua memiliki kemauan, kemampuan dan kesempatan untuk terlibat Patmonodewo, S. (2003: 107). Adanya kemauan dan kemampuan adalah muncul dari dalam diri orang tua sedangkan kesempatan dapat diberikan dari luar diri. Hiryanto, dkk. (2010: 64) Dalam sekolah ada beberapa pihak yang dapat menciptakan kesempatan tersebut, yaitu wali kelas, guru, kepala sekolah, komite sekolah serta pihak-pihak lain yang berada dalam penyelenggaraan sebuah sekolah. Apabila semua pihak yang berada di sekolah memberikan ruang bagi orang tua untuk dapat terlibat dan orang tua tersebut memiliki pengetahuan yang cukup atas pentingnya dan manfaatnya terlibat di sekolah sehingga timbul kemauan dan terus mengasah kemampuannya agar dapat diterima dan berperan aktif dalam pendidikan anaknya di sekolah.

Strategi tahapan pemberdayaan PAUD oleh masyarakat, sebagai contoh model wilayah desa panglipuran bali sebagai berikut Tahap pertama adalah tahap penyadaran dimana pada tahap ini dilakukan sosialisasi. Tahap Kedua peran serta pemerintah lebih berperan dalam mengajak, menggugah, dan menggairahkan masyarakat. Tugas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk kerja sama yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Tahap ketiga yaitu tahap pemberian

bantuan baik berupa dana pinjaman kepada kelompok masyarakat yang memiliki usaha maupun bantuan secara fisik untuk meningkatkan sarana dan prasarana (Anak Agung Istri Andriyani, 2017: 7). PAUD juga telah ditetapkan dalam pasal 28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 yang menjelaskan bahwa PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Dan Pendidikan Anak Usia Dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal. Pendidikan Anak Usia Dini dalam pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK), pendidikan anak usia dini dalam jalur nonformal berbentuk Kelompok Bermain (KB) dan Taman Penitipan anak (TPA), sedangkan pendidikan anak usia dini dalam jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.

SIMPULAN

Pemberdayaan di dalam bidang pendidikan (termasuk PAUD) tidak bisa melalui pendekatan yang parsial akan tetapi memerlukan pendekatan secara holistic yang meliputi pemberdayaan sumberdaya manusia (termasuk didalamnya pendidik, peserta didik, orang tua/wali, masyarakat lingkungan pendidikan, sponsor/pemerintas, dan pengguna lulusan), system pembelajaran, manajemen kelembagaan pendidikan dengan segala sarana dan rasaran pendukungnya, sumberdaya alam, sumberdaya teknologi, dan lain sebagainya. Pemberdayaan itu semua dimaksudkan dalam upaya pemberdayaan di dalam proses mengembangkan potensi (daya) dan kemampuan yang terdapat dalam diri individu dan kelompok masyarakat sehingga mampu melakukan transformasi sosial. Proses ini berlangsung secara berkesinambungan, sesuai dengan prinsip-prinsip belajar sepanjang hayat (life long education), oleh sebab itu kehidupan masyarakat perlu dikondisikan sebagai sebuah wadah, institusi, dan organisasi bagi anggota masyarakat yang melakukan aktivitas-aktivitas yang syarat dngan proses pembelajaran.

Tiga pilar untuk menghadapi tantangan dan kendala dunia pendidikan. Rumusan itu telah dituangkan dalam rencana strategis (Renstra) pendidikan tahun 2005-2009 sebagai suatu kebijakan. Ketiga pilar tersebut adalah: 1. Perluasan dan Pemerataan Akses PAUD, 2. Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing, 3. Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Citra Publik. Penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik PAUD dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan mutu laporan dan pertanggungjawaban para pengelola pendidikan yang lebih transparan dan dapat dipercaya terhadap pelaksanaan pendidikan. Meningkatkan kualitas data dan informasi pendidikan yang cepat, akurat, dan dapat dipercaya dalam upaya mendukung sistem pembuatan kebijakan dan keputusan yang menyangkut manajemen pembangunan di daerah. Meningkatkan peran serta

masyarakat, dunia perusahaan, dan stakeholder pendidikan lainnya yang diarahkan pada kebersamaan memikul tanggung jawab antar pemerintah, masyarakat, dan peserta didik sebagai bagian dari subyek pembelajaran, yang dinamis, adaptif, dan penuh inisiatif. Merintis pembangunan, dan mengembangkan inovasi-inovasi pendidikan yang lebih bersifat antisipatif kearah peningkatan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andri Hadiansyah dkk. 2015. Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pendirian Lembaga PAUD. *Jurnal AL-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA*, Vol .3, No. 1, Maret 2015. Universitas Al Azhar Indonesia Jakarta Selatan.
- Samsul Munir Amin, (2009) Ilmu Dakwah 183-184. Jakarta: Amzah,
- Umrotul Khasanah, (2010) *Manajemen Zakat Modern Instrument Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Malang: UIN MALIKI PRESS.
- Djalal Fasli, (2001), *Pendidikan Anak Usia Dini*, (makalah), Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Barnett, S.W. (2000). "Economic of Early Childhood Intervention" *Handbook of Early Childhood Intervention*, Second Edition Edited by Jack P. Shonkoff and Samuel J. Meisels, Cambridge: Cambridge University.
- Hiryanto, dkk. (2010). *Pemetaan Tingkat Pencapaian Mutu Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)*. Propinsi DIY.
- Irianwati, Nanik. (2013). "*Penilaian Dalam Pembelajaran Anak Usia Dini*". Balai Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal (BP-PNFI) Provinsi Bengkulu.
- Aristiarini Agnes. (2006). Membangun Keindonesiaan baru: Sewindu Reformasi mencari visi Indonesia 2030. *Kompas*, 19 Mei 2006.
- Laelatul Istiqomah. (2016). Tiga Pilar Kebijakan Pemerintah Dalam Pembinaan Paud. *Jurnal Ilmiah Tumbuh Kembang Anak Usia Dini* Volume. 1 No. 2. Juni 2016 eISSN: 25023519.
- Sa'ud, Udin Syaefudin & Abid Syamsudin Makmun, (2011). *Perencanaan Pendidikan Suatu Pendekatan Komprehensif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Anak Agung Istri Andriyani, Edhi Martono, Muhamad (2017). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Sosial Budaya Wilayah (Studi Di Desa Wisata Penglipuran Bali). *Jurnal ketahanan nasional*. ISSN: 0853-9340 (Print), ISSN: 2527-9688.
- Patmonodewo, S. (2003). *Pendidikan Anak Prasekolah*. Jakarta: PT. Asdi Mahasatya
- Jones, D. E., Greenberg, M., & Crowley, M. (2015). Early Social-Emotional Functioning and Public Health : The Relationship Between Kindergarten Social Competence and Future Wellness, *105(11)*, 2283–2290. <https://doi.org/10.2105/AJPH.2015.302630>

- Morrison, G. S. (2015). *Pendidikan Anak Usia Dini Saat Ini*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mushlih, A., Insiyah, M., Uminar, A. N., & Maula, I. (2018). *Analisis Kebijakan PAUD (Mengungkap isu-isu menarik seputar PAUD)*. Jawa Tengah: Mangku Bumi.
- Najib, M., Wiyani, N. A., & Shoclichin. (2016). *Manajemen Strategik Pendidikan Karakter*. Yogyakarta: Gava Media.
- Shonkoff, J. P., Garner, A. S., Siegel, B. S., Dobbins, M. I., Earls, M. F., Garner, A. S., ... Wood, D. L. (2012). The Lifelong Effects of Early Childhood Adversity and Toxic Stress. *Pediatrics*, 129(1), e232–e246. <https://doi.org/10.1542/peds.2011-2663>
- Suyadi, & Ulfah, M. (2017). *Konsep Dasar PAUD*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya Offset.